

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu wilayah dapat dinilai menggunakan bermacam-macam ukuran agregat, salah satunya yaitu dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenaikan nilai produk domestik bruto adalah sebuah syarat yang diperlukan guna meningkatkan pembangunan ekonomi (Syarifah & Ida, 2019). Pendapatan daerah tidak hanya digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah dari periode tertentu ke periode lainnya, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menjadi pembanding bagi wilayah lain (Dumairy, 1999). Pendapatan daerah dengan merujuk pada nilai produk domestik bruto yang terus meningkat memiliki arti bahwa suatu daerah tersebut memiliki keberhasilan dalam pembangunan daerah. Nilai PDRB yang meningkat dapat melahirkan pendapatan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

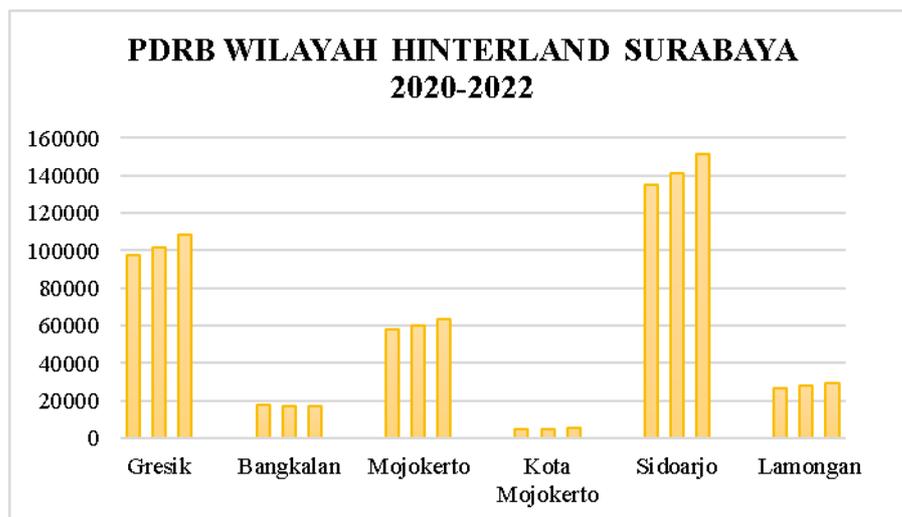
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah kontribusi dari totalitas keluaran akhir yang diproduksi oleh aktivitas perekonomian (Alifah, 2021). Nilai yang ditunjukkan oleh besaran angka PDRB akan menghasilkan informasi tentang kondisi daerah dalam mengendalikan serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut. Nilai produk domestik bruto yang meningkat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Dengan demikian, tiap wilayah harus selalu menargetkan pencapaian produk domestik regional bruto yang tinggi dalam perancangan serta target dari wilayah tersebut. Capaian nilai PDRB dapat dilakukan melalui sektor-sektor induk dan sub-induk yang telah menyumbangkan nilai pertambahan jasa dan barang.

Produk domestik bruto merupakan sebuah alat yang paling umum dan dekat untuk mengamati kondisi statistik ekonomi dikarenakan nilai produk domestik bruto adalah satu diantara banyak cara perhitungan terbaik guna mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mankiw, 2018). Nilai PDRB yang tinggi serta memiliki sifat berkepanjangan adalah kondisi penting bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri melibatkan berbagai dimensi seperti aspek ekonomi, politik, sosial, dan lainnya yang saling berinteraksi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat regional maupun pusat. Pembangunan ekonomi yang terus meningkat pasti akan disertai pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang juga meningkat.

Pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan keberhasilan perekonomian dengan memakai sumber daya yang tersedia secara ideal. Setiap wilayah pasti mengupayakan agar mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik tak terkecuali bagi wilayah yang termasuk dalam kawasan *Hinterland* Surabaya. Surabaya merupakan ibukota sekaligus *Growth Pole* (pusat perekonomian) di Jawa Timur sehingga wilayah ini memiliki nilai PDRB yang tinggi. Kawasan *Hinterland* merujuk pada wilayah yang terkait secara ekonomi dengan pusat perekonomian, khususnya dalam konteks aktivitas ekonomi, perdagangan, dan distribusi (Irfanti et al., 2019). Kawasan *Hinterland* memiliki tingkat keterkaitan tinggi dengan wilayah pusat yang biasanya dilihat dari arus lalu lintas barang, modal, penduduk, dan transportasi (Priyarsono & Sahara, 2015). Kawasan *Hinterland* ini mencakup

daerah-daerah di sekitar Surabaya yang memiliki ketergantungan ekonomi yang signifikan. Wilayah-wilayah *Hinterland* Surabaya yaitu Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Mojokerto, Bangkalan, dan Lamongan (Alifah, 2021). *Hinterland* Surabaya memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan PDRB dan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara Surabaya dengan daerah sekitarnya. Wilayah ini membentuk suatu kesatuan ekonomi yang saling terkait dan saling bergantung untuk mencapai kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

Grafik 1. 1
PDRB Wilayah *Hinterland* Surabaya 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

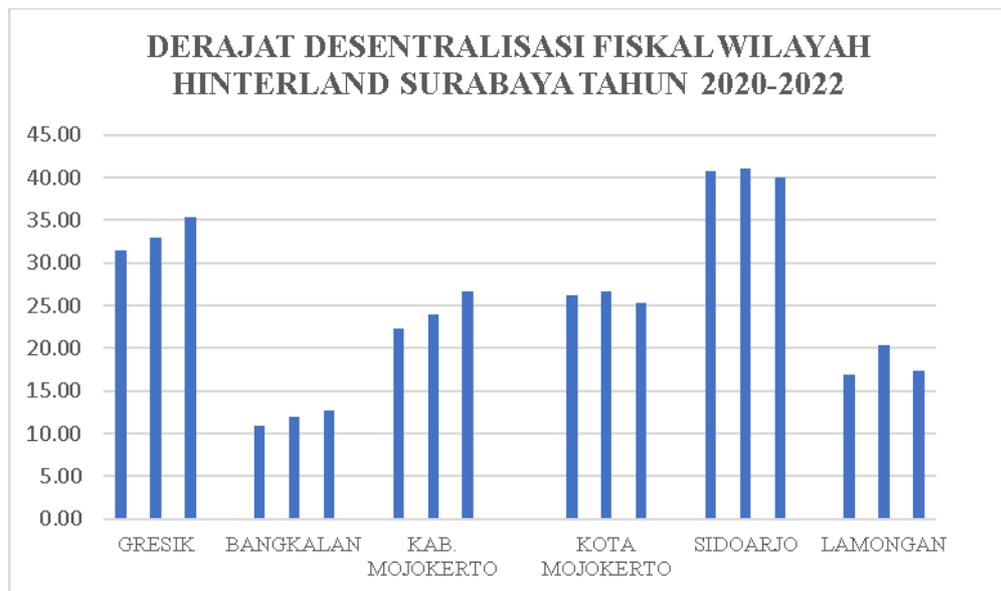
Produk Domestik Regional Bruto di wilayah *Hinterland* Surabaya memiliki perbedaan yaitu wilayah dengan nilai PDRB tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai PDRB sebesar 135305,3 Miliar Rupiah di tahun 2020; 141000,4 Miliar Rupiah di tahun 2021; dan 151613,9 Miliar Rupiah di tahun 2022. Sedangkan wilayah yang memiliki nilai PDRB terendah adalah Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan. Perbedaan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang signifikan

terhadap nilai PDRB di wilayah terendah di kawasan tersebut. Terlihat dari grafik diatas, dari ketiga wilayah yang memiliki PDRB terendah, kota Mojokerto adalah kota yang menduduki peringkat pertama yaitu pada tahun 2022 sebesar 5253 milyar rupiah akan tetapi jika melihat dari segi penduduk dan wilayah kota Mojokerto mempunyai luas area sebesar 16,46 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 132.434 jiwa. Dengan wilayah dan penduduk yang kecil ini membuat kota Mojokerto memiliki sumber daya yang sedikit. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten dengan nilai PDRB terendah kedua di wilayah *Hinterland* Surabaya memiliki nilai PDRB di tahun 2020 yaitu sebesar 17514,6 milyar rupiah; di tahun 2021 sebesar 17152,8 milyar rupiah; dan di tahun 2022 sebesar 1695,9 milyar rupiah, dengan luas daerah sebesar 1260 km² dan jumlah penduduk 1.086.620 jiwa. Artinya Kabupaten Bangkalan memiliki sumber daya yang lebih banyak akan tetapi nilai PDRB yang dimiliki masuk kedalam kategori rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai PDRB salah satunya yaitu dari faktor keuangan daerah seperti kemampuan keuangan daerah dalam mengelola pendapatan baik dari wilayahnya sendiri maupun dari pusat. Pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak berakhirnya masa orde baru dan sejak memasuki masa reformasi, kebijakan otonomi ini menyebutkan bahwa pemerintah yang berada pusat memberikan otoritas kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengendalikan sendiri daerahnya baik dari segi pemerintahan maupun keuangan atau biasa disebut desentralisasi fiskal. Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan baik atau buruknya melalui derajat desentralisasi fiskal yang ada di daerah tersebut.

Dengan adanya desentralisasi fiskal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dengan mengurangi kesenjangan antar daerah. Adanya desentralisasi fiskal ini merupakan salah satu perwujudan kebijakan otonomi daerah yang memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Desentralisasi keuangan juga dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, dikarenakan kebijakan pembangunan akan disesuaikan kebutuhan lokal. Koefisien ini akan mendorong pada peningkatan produk domestik regional bruto.

Grafik 1. 2
Derajat Desentralisasi Fiskal Wilayah *Hinterland* Surabaya Tahun 2020-2022



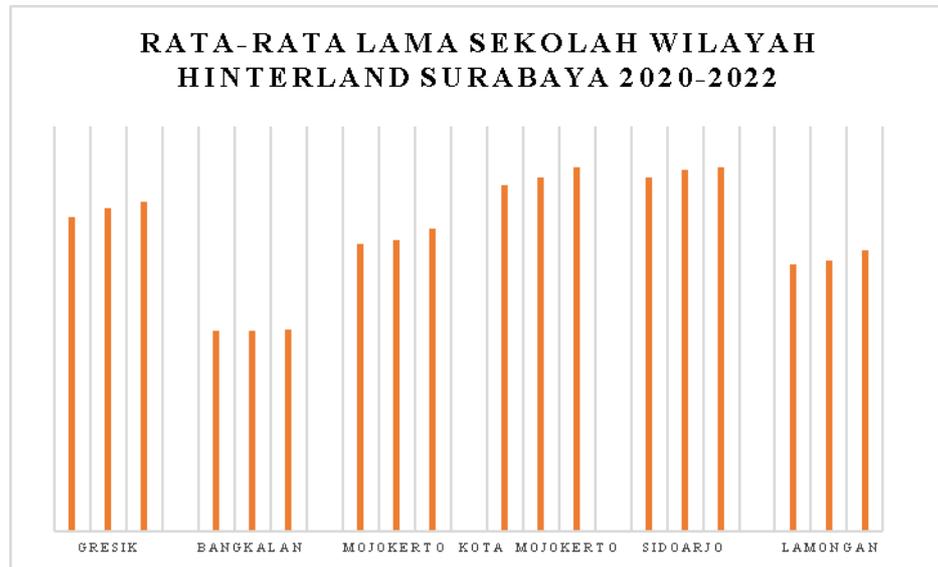
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, 2024

Berdasarkan dari grafik 1.2 diatas, derajat desentralisasi fiskal dapat mengukur kemampuan keuangan daerah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki nilai DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal) yang rendah yaitu sebesar 10,89 persen di tahun 2020; 11,94 persen di tahun 2021;

dan 12,70 persen di tahun 2022. Nilai DDF yang rendah di Kabupaten Bangkalan ini membuat Kabupaten Bangkalan masuk dalam kategori “Kurang” Artinya Kabupaten Bangkalan belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik karena masih memiliki ketergantungan pada dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Dari nilai DDF ini juga menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan dalam menghasilkan pendapatan dan penggalan potensi-potensi daerah juga kurang serta tidak dapat menyelaraskan posisi seperti daerah lain di wilayah *Hinterland* Surabaya. Wilayah dengan nilai DDF tertinggi yaitu Kabupaten Sidoarjo, ditahun 2020 nilai DDF sebesar 40,77 persen; lalu di tahun berikutnya sebesar 41,14 persen; selanjutnya di tahun 2022 sebesar 40,00 persen. Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kemampuan daerah dengan kategori “Baik” dan memiliki nilai DDF tertinggi setelah Kota Surabaya. Artinya Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Selain dari faktor keuangan, faktor non keuangan seperti pendidikan juga turut mempengaruhi PDRB. Nilai PDRB adalah tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki kaitan erat dengan akumulasi modal (modal manusia) dalam meningkatkan produktivitasnya. Modal manusia yang berkualitas dapat dicerminkan dari pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan seseorang menempuh pendidikan yang lebih baik maka seseorang tersebut dapat cenderung lebih produktif dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teknologi di wilayahnya sehingga ketika produktivitas naik maka PDRB juga naik.

Grafik 1. 3
Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah *Hinterland* Surabaya Tahun 2020-2022



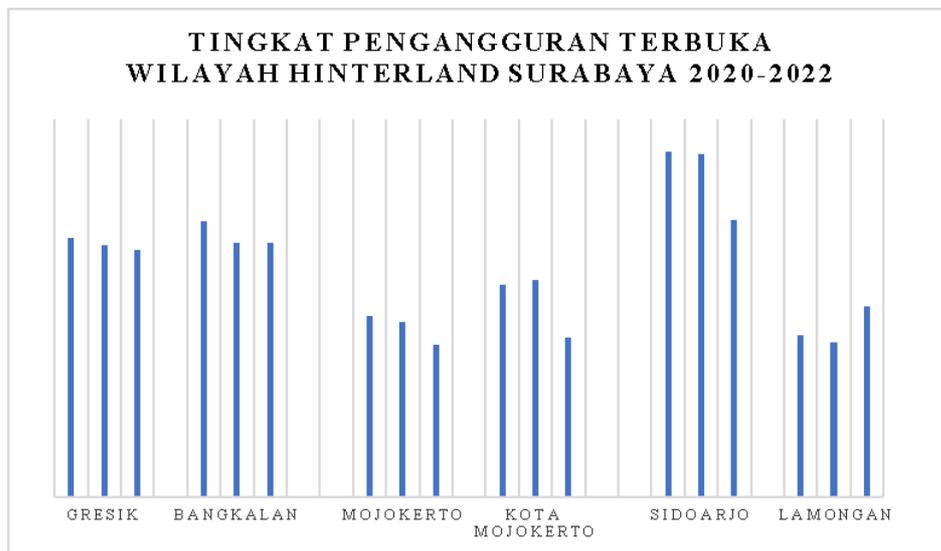
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan dari grafik 1.3 diatas, bahwa pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah wilayah Kabupaten Bangkalan merupakan yang terendah daripada wilayah lain di kawasan *Hinterland* Surabaya. Di tahun 2020-2022 terjadi peningkatan sebanyak 0,01 dijangka waktu 2020-2022, akan tetapi peningkatan ini masih tergolong yang paling rendah jika dibandingkan wilayah lainnya. Rata-rata lama sekolah di tahun 2020 sebesar 5,95 tahun lalu meningkat 0,01 di tahun 2021 yaitu sebesar 5,96 tahun dan di tahun 2022 sebesar 5,97 tahun. Wilayah dengan nilai tertinggi yaitu wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 10,5 tahun pada 2020; 10,72 tahun pada 2021; dan 10,77 tahun pada 2022. Angka ini merupakan angka tertinggi di kawasan *Hinterland* Surabaya.

Selain faktor non-keuangan dari pendidikan, banyaknya masyarakat yang menganggur juga turut menciptakan nilai PDRB yang rendah.

Pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan produktivitas karena sebagian besar sumber daya manusia tidak digunakan secara efisien sehingga menciptakan nilai produk domestik bruto yang kurang (Mankiw, 2018). Pengangguran tercipta dari adanya tambahan angkatan kerja yang lebih cepat namun tidak diikuti dengan penambahan lapangan pekerjaan. Hal ini membuat, pengangguran semakin meningkat. Untuk melihat besaran pengangguran dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Grafik 1. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Hinterland Surabaya 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Terlihat dari grafik 1.4 diatas, bahwa pengangguran dengan diukur dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo memiliki pengangguran yang paling tinggi yaitu sebesar 10,97 persen di tahun 2020; 10,87 persen di tahun 2021; dan 8,8 persen di tahun 2022. Kabupaten Bangkalan adalah wilayah yang memiliki pengangguran yang tinggi setelah Kabupaten Sidoarjo. Nilai pengangguran di Kabupaten Bangkalan di tahun

2022 sebesar 8,05 persen, lalu ditahun 2021 sebesar 8,07 persen; dan di tahun 2020 sebesar 8,77 persen.

Berdasarkan latar belakang di atas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi oleh beberapa modal fisik atau faktor keuangan seperti kemampuan keuangan daerah yang dinilai dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Dan modal non-fisik atau faktor non-keuangan yaitu dari pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat mengenai derajat desentralisasi fiskal, pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka serta pengaruhnya terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah yang memiliki PDRB terendah dan PDRB tertinggi di kawasan *Hinterland* Surabaya dengan judul “**Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah ada pengaruh dari pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah ada pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan memakai data *time series* dari Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo. Ruang lingkup penelitian ini menggunakan analisis pengaruh variabel independen yaitu derajat desentralisasi fiskal, pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo dengan periode tahun penelitian yaitu 2008-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk mengetahui faktor dan komponen apa saja yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan PDRB di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memperkaya jumlah karya ilmiah terkhusus serta dapat digunakan sebagai studi banding bagi riset/penelitian berikutnya baik secara pemahaman ataupun hasil penelitian.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mengentaskan masalah terkait nilai PDRB di kedua wilayah.

b. Bagi Masyarakat

Memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai keadaan, faktor dan komponen yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kedua wilayah. Dengan ini masyarakat bisa tau peran apa yang harus diambil untuk menuntaskan masalah tersebut bersama pihak tersebut.

c. Bagi Mahasiswa

Memperoleh informasi mengenai pengembangan teori ekonomi secara riil dalam bentuk analisis data yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi bacaan maupun penelitian selanjutnya.